



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WARSONO
2. Jabatan : HAKIM AD-HOC
3. NHK : 269319

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.030.396.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.179 m2/195 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 367.900.000
2. Tanah Seluas 1.721 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 277.636.000
3. Tanah Seluas 1.527 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 308.000.000
4. Tanah Seluas 1.244 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 251.800.000
5. Tanah Seluas 1.186 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 76.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 5.046 m2/54 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 403.050.000
7. Tanah Seluas 3.411 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 345.510.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 317.550.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 164.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000



3. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.550.000
5. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 116.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	651.801.074
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.099.747.074
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.099.747.074

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.